

Forum Freedom 26, 14 Nopember 2005

**Tema: Kebebasan Pers**

**Nara sumber : Andreas Harsono**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

**Hamid Basyaib (HB)**

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan saya dalam acara Forum Freedom. Kerjasama Freedom Institute dan radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Pagi ini tamu saya adalah Andreas Harsono. Kita akan berbicara sesuai dengan keahliannya Bung Andreas, yaitu seputar pers.

Begini Ndre, orang bilang kebebasan pers dan hak asasi itu bagian dari hak asasi manusia. UUD 45 pasal 28 butir f, berbunyi: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi pengertiannya luas sekali. Meskipun begitu kita juga pernah mengalami penindasan, kecurigaan, dan alasan-alasan lain yang terlalu jelas. Intinya adalah pers dibungkam. Jadi poinnya di sini adalah soal kebebasan pers dan mendapatkan informasi. Menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan pers dan mendapatkan informasi itu?

**Andreas Harsono (AH)**

Ada sebuah pengertian (pernyataan) di dalam ilmu politik (yang sungguh menarik). Intinya begini: makin bermutu jurnalisme di dalam suatu masyarakat, maka makin baik pula informasi yang diperoleh masyarakat yang bersangkutan. Sederhananya begitu. Misalnya begini: ada sebuah kampung. Di kampung itu ada media, entah itu radio kecil atau papan pengumuman yang baik. Ini berarti orang-orang di kampung itu makin mendapatkan informasi yang bermutu, maka makin baik pula untuk mengambil keputusan mereka bersama-sama. Mulai dari soal menangani pencurian atau menangani kemacetan got, dst. Jadi di dalam suatu masyarakat, di mana medianya atau komunikasinya makin bermutu, makin baik, maka makin bermutu pula proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat bersangkutan.

**HB**

Akhirnya kehidupan masyarakat itu lebih meningkat?

**AH**

Exactly, sehingga proses untuk mendapatkan informasi yang bermutu itu perlu dilindungi. Perlindungan itulah yang disebut kebebasan pers. Bahwa pers atau media itu harus bebas agar kehidupan masyarakat itu terlindungi.

**HB**

Itu dasarnya kenapa kebebasan mendapatkan informasi itu perlu dijamin ya?

**AH**

Exactly..

**HB**

Dalam hal ini kita sudah punya ya?

**AH**

Di Indonesia ini memang secara teoritis ada jaminan terhadap kebebasan pers. Namun kalau kita lihat hukum-hukum yang ada, sampai hari ini dan sejak Indonesia dibidang merdeka, masih banyak hukum-hukum yang tidak menjamin kebebasan pers. Di KUHP misalnya ada 38 pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers.

**HB**

Anda hitung ya?

**AH**

Itu kesimpulan dewan pers.

**HB**

Masalahnya begini. Di satu pihak ada orang yang berpendapat seperti Anda. Anda termasuk praktisi pers yang berpengalaman. Kurang lebih 20 tahun Anda berkecimpung di wilayah ini. Anda berada di pihak yang pro pada kebebasan pers. Tapi banyak juga orang yang tidak sejalan dengan Anda, yang menganggap bahwa kebebasan itu berbahaya. Ini yang saya kira terjadi. Nah, setelah Orde Baru tumbang, banyak orang yang mendesak agenda seperti Anda, dan banyak juga yang enggak. Misalnya para pejabat yang menganggap pers kita kebablasan. Bagaimana menurut Anda?

**AH**

Memang soal kebablasan ini pernah didiskusikan juga oleh orang media. Saya ingat Jakob Oetama dari Kompas mengakui bahwa adanya kebablasan itu. Memang benar terjadi kebablasan itu. Sekarang ini kan (media) isinya cuma kriminalitas, seks, dsb. Atau kalau kita lihat di tv-tv kan isinya kebanyakan acara mistik, dsb. Acara-acara aneh yang dianggap kurang bertanggung jawab. Namun kalau kita mau belajar dari pengalaman negara-negara lain, terutama Eropa Timur, saya kira sebaiknya kita bersabar. Masyarakat akan bisa menilai. Kelak, saya yakin pers yang sensasional itu tidak akan bertahan. Sejarah membuktikan bahwa mereka yang serius dan bertanggung jawab justru mereka yang bertahan. Namun, juga ilusi untuk berharap bahwa di dalam alam pers yang bebas itu tidak akan ada pers yang tidak bertanggung jawab. Itu juga ilusi. Pasti ada...

**HB**

Di negara-negara Eropa barat pun banyak sekali tabloid seperti itu?

**AH**

Banyak sekali.

**HB**

Tapi Anda tidak khawatir ya?

**AH**

Saya tidak khawatir. Karena konsekuensi dari pers yang bebas, pasti ada orang yang kurang bertanggung jawab, pasti ada wartawan yang kurang bertanggung jawab. Di pulau Jawa ini banyak sekali wartawan yang kurang bertanggung jawab.

**HB**

Sepertinya Anda menganggap kebebasan ini tetap lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Benar begitu?

**AH**

Saya percaya seratus persen bahwa kebebasan ini lebih banyak baiknya daripada buruknya.

**HB**

Tetapi kalau baik semuanya tentu enggak bisa, harus realistis ya?

**AH**

Pasti.

**HB**

Lalu hubungan pers dengan demokrasi?

**AH**

saya punya cerita yang menarik: bulan Agustus lalu, saya bertemu dengan guru saya di London, namanya Bill Kovach. Dia cerita bagaimana dia ditelpon oleh seorang jenderal di militer Amerika Serikat. Si jenderal ini cerita tentang penyiksaan oleh tentara atau aparat keamanan Amerika terhadap tahanan di Guantanamo, di Kuba. Si jenderal ini menelepon Kovach dan bilang, "aku ingin ini diberitakan.." Nah Kovach bilang bahwa banyak sekali jenderal-jenderal Amerika yang jengkelnya minta ampun dengan George Bush. Mereka enggak suka. Mereka menganggap Bush *menghijack* pemerintah Amerika. Kami kemudian ngobrol terus tentang ketidakpuasan di kalangan militer terhadap Bush.

**HB**

Ketidaksukaannya ini menyangkut keseluruhan policy Bush atau hanya kasus Guantanamo?

**AH**

Guantanamo itu pemicunya, tapi Anda juga tahu ada penjara Abu Ghuraib. Mereka merasa bahwa Bush ini membuat citra Amerika jadi turun, dan militer Amerika yang kena getahnya. Saya terus tanya sama Kovach, "Kalau gitu jenderal-jendral itu ada kemungkinan kudeta enggak?" Kovach malah tertawa dan bilang, "Enggak mungkin.." Lalu saya tanya lagi, "Lho kenapa?" Kovach jawab, "Lha kan ada pers"

Yang membocorkan rahasia-rahasia pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Amerika kepada pers adalah jenderal Amerika. Jadi itulah salah satu aspek penting dari kebebasan pers: mereka bisa ikut mengontrol dan membantu masyarakat untuk tahu bahwa pemerintah mereka berengsek.

**HB**

Poinnya adalah pers itu betul-betul punya peran yang menentukan di dalam peningkatan kualitas demokrasi?

**AH**

Pasti. Demokrasi tidak hanya soal mencoblos, tapi juga apa yang disebut civil liberties. Kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dst.

**HB**

Itu luar biasa, orang seperti Bill Kovach betul-betul mengandalkan pers, bahkan sebagai pencegah kudeta?

**AH**

Exactly. Dia sering mengatakan bahwa kalau ada satu hal di luar agama saya yang saya anggap berguna buat kehidupan orang banyak, itu adalah jurnalisme.

**HB**

Ini yang jadi soal. Sebagian orang menganggap bahwa kebebasan pers yang besar dalam masyarakat akan membuat masyarakat itu semakin maju dan berkembang. Seberapa jauh kesahihan pandangan ini? Dan banyak sekali yang meragukan pandangan ini?

**AH**

Memang. Kalau kita lihat mutu media di Jakarta ini, memang enggak baik-baik amat. Bahkan sangat buruk. Untuk ukuran internasional tentu di bawah standar. Kelompok Kompas-Gramedia, Tempo, Jawa Pos, RCTI, SCTV, saya kira standar mereka ada di bawah standar internasional.

**HB**

Yang Anda maksud standar internasional termasuk Asia?

**AH**

Antara lain Asia Tenggara.

**HB**

Maksudnya, untuk ukuran Asia Tenggara saja termasuk rendah?

**AH**

Saya kira begitu.

**HB**

Apa indikatornya?

**AH**

Banyak sekali. Banyak konvensi di dalam jurnanisme yang belum dipakai di Jakarta ini. Salah satu hal yang sangat sering saya bicarakan adalah tidak adanya *bylines*. Kalau Anda perhatikan surat kabar di Singapur, di Bangkok, di Manila, Jepang, di Amerika, semua berita itu menggunakan *bylines*. Misalnya begini: ada berita gempa bumi di Liwa, Lampung. Di bawah berita itu ada *by lines* oleh Hamid Basyaib. Kalau kita perhatikan Kompas, Tempo, itu kan tidak ada *by lines*. Padahal, *by lines* adalah masalah accountability. Kalau dia menulis baik, dia akan dipuji. Orang akan menilai prestasi si wartawan. Kalau dia nulis buruk, dia akan ketahuan. "O, si Hamid Basyaib ternyata bukan wartawan yang baik..." Namun di dalam tradisi jurnanisme kita, itu tidak ada. Dan sampai hari ini mungkin baru tiga atau empat surat kabar yang menggunakan *bylines* dari 900 surat kabar.

**HB**

Apakah itu bisa ditafsirkan sebagai cara mereka untuk mengatakan bahwa apa saja yang muncul di media ini adalah suara media ini? Bukan suara saya yang kebetulan bekerja di sini?

**AH**

Memang mereka mengatakan hal seperti itu. Atau ada yang bilang, "Kita kasih *by lines* kok tulisannya bagus.."

**HB**

Aneh dong, hanya karena bagus?

**AH**

Ya. Kalau bagus, feature dan analisis itu pakai *bylines*. Tapi kalau berita biasa enggak pakai *by lines*. Itu bukan prinsip *by lines*. Prinsip *by lines* itu justru yang jelek itu bisa dikontrol oleh pembaca, audiens. Justru yang jelek yang perlu ketahuan. Yang bagus, so what.

**HB**

Seharusnya semua tulisan yang muncul itu bagus..

**AH**

Sekarang ini banyak orang yang berlindung di balik redaksi, sehingga prestasi individu wartawan di Jakarta atau di pulau Jawa itu enggak pernah muncul. Itu karena tidak ada *by lines*. Kalau tidak ada *by lines* dan prestasi, orang tidak dipacu untuk berprestasi..

**HB**

Kalau nama penulis yang di bawah, biasanya dalam kurung yang dicetak tebal, itu tidak termasuk by lines?

**AB**

Bisa bylines kalau sendirian. Karena dianggap hanya orang itu yang bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Tapi kalau banyak, itu harus dibedakan antara siapa yang menulis dan siapa yang memberikan kontribusi terhadap sebuah berita. Sebuah berita itu kan biasanya dikerjakan oleh tiga orang, tapi yang nulis itu hanya satu. Nah, yang satu itu harus dibedakan dengan yang lainnya.

**HB**

Andre, sekarang kita bisa masuk ke bagian kedua, yaitu perbandingan soal kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi di masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Lalu apa pandangan umum Anda tentang ini?

**AH**

Menurut Benedict Anderson, seorang professor dari Cornell, periode pers yang paling bagus, dinamis, kritis, dan terbuka di kepulauan ini terjadi di tahun 1910-an.

**HB**

Di zaman Belanda.

**AH**

Ya. Zamannya Mas Marcodikromo, Pangemanan, HC Sengraf, dsb. Mereka jauh liberal, terbuka, dan kreatif daripada pers di jaman Indonesia.

**HB**

Dari aspek apa saja?

**AH**

Macam-macam. Pertama, tidak ada represi yang seberat di zaman Indonesia. Tidak ada wartawan yang dibredel, atau di siksa. Ada denda dan ada yang masuk penjara, tapi semua ada ukurannya. Sekarang ini ada orang yang dibunuh dan di penjara tanpa alasan yang jelas, apalagi di masa orde baru. Sehingga media jadi takut. Pada zaman itu (1910-an) tidak ada. Kalau kita ingat pada jaman itu, saya pernah membaca polemik kebudayaan antara Sutan takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, itu luar biasa bagus. Itu luar biasa bagus dan sangat kaya. Atau lihat debatnya Soekarno dengan A. Hasan di Suluh Indonesia (Bandung). Tulisan-tulisan Hata pada waktu itu. Ya, esei-esei yang bagus, kuat, dan tajam itu bermunculan di masa lalu dan tidak ada di zaman sekarang.

**HB**

Pandangan Anda ini agak aneh. Banyak orang menganggap periode reformasi ini membuat pers menjadi bebas, Deppen dibubarkan. Jadi kalau saya punya uang, saya akan mudah menerbitkan Koran. Anda enggak melihat bahwa ini (sebuah kebebasan)?

**AH**

Memang. Dari segi kebebasan tentu sangat maju. Namun ada tekanan lain yang muncul, namanya pasar. Dan juga konglomerasi media.

**HB**

Artinya pengusaha yang bukan bergerak di bidang media?

**AH**

Ya, tekanan pasar. Sekarang orang harus efisien. Satu wartawan harus nulis tiga berita sehari. Atau terjadi pemakaian berita secara bersama-sama; satu wartawan beritanya dipakai oleh beberapa atau puluhan surat

kabar. Itu tidak baik. Karena persepsi satu orang itu tentu lebih kurang baik daripada persepsi sepuluh orang. Jadi ada tekanan pasar. you know, orang-orang para pengusaha media ini dulu kan membuat banyak uang. Di Kompas, Tempo, RCTI, dst, *they make a lot of money, they make so much money by doing this bussines, why should they change?* Mengapa mereka harus berubah jika mereka bisa berbaik-baik dengan penguasa? Mengapa harus berubah? Jadi mereka sekarang bergandeng tangan dengan presiden, mentri, jenderal, karena itu membuat mereka aman.

**HB**

Tapi beberapa media, misalnya Kompas, jelas sekali sangat kritis terhadap Presdien SBY?

**AH**

Secara khusus mereka kritis dalam satu dua kali peristiwa kenaikan harga minyak tanah dan bensin. Namun secara umum tidak. Yang juga bisa Anda perhatikan adalah, media di Jawa, Medan. Makassar, itu tidak pernah mau mengkritik sesama media. Itu kasus yang luar biasa anehnya. Kenapa? Karena salah satu kerja media adalah memantau kekuasaan. Kekuasaan itu bisa pemerintah, pers, tentara, agama, dst. Tetapi kalau sesama media, tidak pernah dipantau dengan standar yang sama. Jadi agak aneh.

**HB**

Apakah praktek semacam itu cukup lazim di tempat lain?

**AH**

Ya. Setahu saya banyak negara di India, Amerika...

**HB**

Artinya kalau ada Koran atau majalah mingguan nulis jelek, dia akan dikritik oleh Koran lain?

**AH**

Ya, itu sangat biasa. Misalnya sekarang ini ada tuduhan bahwa Dahlan Iskan terlibat dalam tindakan korupsi, menggelapkan pajak, dst. Namun apakah ada pemberitaan di media lain (tentang tindakan Dahlan itu)?

**HB**

Ada solidaritas ya?

**AH**

Memang.

**HB**

Menurut Anda, solidaritas semacam ini tidak pada tempatnya?

**AH**

Menurut saya salah. Ini merugikan masyarakat. Jawa Pos itu punya perusahaan banyak. Mulai dari Aceh di Banda Aceh hingga Timur Ekspres di Kupang, Cendrawasih Pos di Jayapura, dst. Dan CEO dari semua surat kabar ini terlibat tindakan korupsi, kenapa tidak diberitakan? Dituduh korupsi, bahkan salah satu anak buah dia sudah diperiksa.

**HB**

Kalau misalnya berita semacam itu tidak muncul di media massa di bawah Jawa Pos Group misalnya, Anda masih bisa mengerti?

**AH**

Saya tidak bisa terima juga.

**HB**

Mestinya Anda bilang bahwa pemilik Koran itu pun kalau salah harus salah?

**AH**

Harus diberitakan oleh Koran yang bersangkutan.

**HB**

Artinya pemilik Koran itu tidak diperankan sebagai pemilik Koran, tetapi sebagai warga negara biasa?

**AH**

Ya, sebagai berita biasa saja. Bisa diedit oleh orang lain kalau tidak mau dibilang tidak independen. Sangat biasa. Saya pernah bekerja di beberapa media internasional. Kalau editor saya salah, mereka selalu bilang, "Anda punya hak untuk melaporkan dan menulis cerita tentang saya.."

**HB**

Jadi sudah ada semacam kesepakatan ya?

**AH**

Ya. BBC itu pernah membuat kesalahan sehingga seorang narasumber mereka bunuh diri. Itu dilaporkan oleh BBC sendiri. The New York Time ada reporternya yang menipu, dilaporkan oleh The New York Time sendiri. The New Yor Time pernah membuat kekeliruan soal senjata pemusnah masal di Irak, itu diberitakan oleh New York Time dan mereka minta maaf.

**HB**

Kalau di Koran kita, kalau wartawannya sendiri yang meninggal baru dimuat?

**AH**

Ya, atau kalau kawin misalnya.

**HB**

Praktek itu menurut saya enggak terlalu baik. Dia menempatkan Koran itu sebagai Koran keluarga?

**AH**

Itu enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kalau pemilik itu korupsi, melakukan kejahatan, melakukan pelecehan seksual, itu harus diberitakan. Karena mereka memberitakan orang lain. Orang selingkuh diberitakan; orang korupsi diberitakan, tapi dirinya sendiri enggak diberitakan.

**HB**

Artinya kalau dia menempatkan sebagai pranata masyarakat, itu seharusnya enggak ada masalah?

**AH**

Dan itu justru akan membuat kredibilitas Koran bersangkutan semakin tinggi.

**HB**

Nah ancaman buat kebebasan pers juga. Anda bilang soal konglomerasi. Misalnya, pemilik media itu dengan alas an bisnis mengontrol isinya?

**AH**

Kalau menurut survey dari NDI, hampir 95 persen seluruh surat kabar dan tv yang ada di Indonesia ini dimiliki perusahaan-perusahaan yang pemegang sahamnya ada di Jakarta. Jadi sangat terkonsentrasi oleh segelintir orang yang ada di Jakarta. Baik itu harian Serambi di Banda Aceh hingga haria Cendrawasih Pos di Jayapura, itu dimiliki oleh orang Jakarta. Sekitar sebelas tv nasional yang ada di Jakarta itu menguasai

audiens sekitar 92 persen di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya mengganggu sekali. Artinya suara, reportase, perspektif, interpretasi berita itu semua ditentukan dari Jakarta.

**HB**

Menurut Anda, itu efek terburuk?

**AH**

Efeknya adalah suara-suara orang di luar Jakarta tidak pernah muncul di media.

**HB**

Kalau ini masalah, tentu ada solusi. Anda sepertinya membayangkan ada majalah lain yang terbit di Palembang, Pontianak?

**AH**

Ya, tapi yang dikelola oleh orang local; yang manajemennya itu ditunjuk/atur dari aspirasi orang-orang setempat. Menurut saya, itu jauh lebih bagus. Karena mereka tentu lebih mengenal daerahnya ketimbang orang Jakarta.

**HB**

Tapi selama ini prakteknya seperti itu. Artinya orang Jakarta punya group di Medan, dan wartawan Medan yang mengelola?

**AH**

Ya, wartawan Medan. Tapi manajernya dan pengambil keputusannya dari Jakarta. Terutama (manajer) bagian keuangan, bagian manajemen, bahkan pemimpin redaksi itu datang dari group yang ada di Jakarta atau Surabaya.

**HB**

Dengan semua uraian itu, bisa enggak saya simpulkan bahwa menurut Anda, kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi itu tidak termanfaatkan dengan semestinya. Itu karena ada alasan-alasan tadi: konsentrasi pemilik modal di Jakarta. Adakah aspek lain, mutu wartawan misalnya?

**AH**

Ya. Menurut beberapa survey, kebanyakan wartawan di Jawa dan Medan itu kan terima amplop, suap. Tapi saya kira di tempat lain pun sama. Salah satu jurnalisme terburuk di Indonesia adalah amplop, suap. Wartawannya mudah sekali disuap. Mungkin mereka mengatakan gajinya kecil. Tapi saya kira kebanyakan wartawan menerima upah di atas upah minimum. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan suap.

**HB**

Di luar hal itu?

**AH**

Tulisan. Tulisan juga buruk. Tradisi wartawan kita tidak bisa menulis dengan baik. Semua orang mengeluh. Goenawan Moehamad mengeluh. Jakob Oetama mengeluh. Semua orang mengeluh karena wartawan tidak bisa menulis dengan baik. Kalau Goenawan mengatakan bahwa ini terjadi karena di Indonesia tidak ada tradisi menulis yang berkembang. Itu keluhan secara umum. Tapi sebenarnya kalau diberikan kesempatan itu bisa. Saya pernah mengelola sebuah majalah, namanya majalah pantau. Kami menerbitkan tulisan-tulisan yang bagus dan menjadi buku. Beberapa orang menganggap buku itu bagus. Maria Hartiningsih dari Kompas mengatakan bahwa itu esai atau laporan terbaik yang dibuat wartawan Indonesia masa kini. Ketika saya perhatikan, orang-orang yang menulis itu umurnya masih muda-muda. Kalau diberikan kesempatan; kalau medianya mendorong;



memberikan fasilitas, tempat, tim editor yang bagus, back up system yang bagus, ya jalan. Saya kira persoalannya adalah system kerja, system assignment, system penilaian di Jakarta ini yang cacat. Sehingga tidak muncul mutu jurnalisme yang bagus.

**HB**

Cukup aneh. Ok, mudah-mudahan kita bisa membahasnya di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadiran anda..